

**BAB II**  
**KEBERADAAN DAN KONDISIONALITAS CGI**  
**PERIODE 2000-2007**

**A. SEJARAH DAN PERANAN CGI**

**A.1. SEJARAH IGGI KE CGI**

Indonesia telah empat puluh tahun lebih berada di bawah dukungan *Aid Coordination*, yaitu IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*) dan CGI (*Consultative Group on Indonesia*). IGGI dan CGI pada dasarnya merupakan forum koordinasi untuk meningkatkan harmonisasi, efektifitas dan efisiensi bantuan luar negeri. Forum ini di bentuk untuk 1) Mendukung pemerintah RI dalam pembiayaan program-program pembangunan (dalam bentuk pemberian hibah atau pinjaman untuk menutup defisit anggaran) dan 2) meningkatkan Kordinasi antara pemerintah RI dengan para donor dan Kordinasi antar donor sehingga bantuan yang di berikan dapat berjalan harmonis, efektif dan efisien<sup>67</sup>.

IGGI adalah Forum yang didirikan sejak tahun 1967. Bersidang untuk pertama kalinya pada 20 februari 1967, di Amesterdam. IGGI ini di ketuai oleh pemerintah Belanda. Sejak tahun 1967 hingga tahun 1974 bersidang sebanyak dua kali setahun. setelah tahun 1974 hingga 1992, bersidang sekali setahun<sup>68</sup>.

Dari berbagai pertemuan di Tokyo (September 1967) dan di Paris (Desember 1967) muncul terobosan baru untuk membentuk satu konsorsium yang mewakili banyak negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Belanda, Perancis, Jerman Barat, Inggris, Australia, dan negara-negara barat lainnya. Tujuannya adalah membantu pembangunan ekonomi Indonesia melalui pemberian dana setiap tahun dengan. Konsorsium tersebut di beri nama *Intergovernmental Group on Indonesia* (IGGI). Pada tahun pertama IGGI menyetujui pinjaman sebesar \$ 167,3 Juta dan pada tahun kedua dan ketiga masing-masing sebesar \$ 361, 2 juta dan \$ 507,7 juta, selain memberikan bantuan, pertemuan di Tokyo dan di Paris juga

---

<sup>67</sup>Kurniawan Ariadi , “ Kebijakan pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah selepas CGI “: *Pemantapan Kebijakan Pengelolaan Pinjaman Luar negeri pemerintah selepas CGI*, Diskusi terbatas Bank Indonesia , 26 April 2007

<sup>68</sup> Rivani Noor , *Loc.Cit.*

menyelenggarakan kesepakatan bagi penjadwalan kembali pembayaran utang Indonesia. Hingga lebih dari 20 tahun kemudian IGGI memainkan peran vital sebagai medium bagi Indonesia untuk memperoleh dana-dana publik dengan tingkat yang jauh di bawah harga pasar, yang kemudian digunakan untuk memperluas berbagai program pembangunan serta memperkuat neraca pembayaran<sup>69</sup>.

IGGI adalah konsorsium negara-negara donor yang dibentuk tahun 1967 guna membantu pembangunan di Indonesia. Pembentukannya diprakarsai oleh pemerintah Amerika pada tahun 1966. Persidangan IGGI yang pertama berlangsung di Amsterdam, Februari 1967. Dihadiri oleh 14 negara dan lima organisasi Internasional<sup>70</sup>.

Kelima organisasi tersebut adalah Dana Moneter Internasional atau IMF (*International Moneter Fund*), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Badan Kerjasama Pembangunan Ekonomi Eropa atau OECD, serta Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau UNDP (*United Nations Development Program*). Sedang 14 negara-negara anggota IGGI antara lain AS, Jepang, Belanda, Perancis, Jerman, Kanada, Australia, Inggris, Spanyol, Austria dan Selandia Baru<sup>71</sup>.

Selanjutnya pada tanggal 23 – 24 Februari 1967, pemerintah Belanda kembali mengundang 14 negara dan 5 organisasi internasional untuk mengadakan pertemuan di Amsterdam<sup>72</sup>. Delegasi Indonesia di pimpin oleh Menteri Utama bidang Ekonomi dan keuangan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Pertemuan Amsterdam ini merupakan pertemuan pertama *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI)<sup>73</sup>.

Sebelum pelaksanaan pertemuan IGGI, Menteri kerjasama Pembangunan Belanda mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk mengadakan tukar pikiran

---

<sup>69</sup>Malarangeng, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2008, hal 51.

<sup>70</sup>*Suara Pembaruan*, 2 April 1992.

<sup>71</sup>*Ibid.*

<sup>72</sup> Pemilihan Amsterdam sebagai tempat persidangan pertama serta pemilihan Belanda sebagai tokoh kunci dalam IGGI, dilakukan berdasarkan perhitungan politis. Antara lain guna menghapus citra buruk terhadap Belanda, yang pernah menjajah Indonesia. Selain itu, guna mengundang dukungan internasional. Melalui forum itu ditampilkan betapa Belanda yang pernah menjajah dan diperangi oleh Indonesia, menaruh perhatian khusus bagi pembangunan Indonesia yang pada tahun 1960-an itu sangat tersendat, (Politik dan Ekonomi IGGI, diakses dari [Http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1992/04/19/0002.html](http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1992/04/19/0002.html)).

<sup>73</sup> *Suara Pembaruan*, *Ibid.*

tidak saja dengan kalangan pemerintah melainkan juga dengan *civil society* dan juga melakukan kunjungan lapangan untuk memantau pelaksanaan pinjaman / hibah IGGI. Dalam perkembangannya kemudian, kalangan pemerintah Indonesia menilai kunjungan Menteri Kerjasama pembangunan dipakai sebagai sarana atau tempat “mangadu“ kalangan *civil society* terutama yang secara politik bersebrangan dengan pemerintah.

Disamping itu, terlebih sejak dijabat oleh J.P Pronk, Menteri Kerjasama Pembangunan sering mengangkat isu dan melontarkan pernyataan mengenai hal-hal di luar masalah kebijakan ekonomi (moneter, fiskal dan anggaran), dan di luar masalah pelaksanaan proyek-proyek pinjaman/hibah IGGI sesuai dengan ide dasar pembentuka IGGI. Isu-isu hak asasi manusia, Perburuhan, dan partisipasi politik/demokrasi sering di lontarkan J.P Pronk. Sebagai ketua IGGI, sudah barang tentu pertanyaannya akan mempengaruhi pandangan umum peserta dan kespakatan pertemuan IGGI. Hal ini sering menempatkan pemerintah Indonesia (Pemerintah Orde Baru) dalam posisi yang tidak menguntungkan di hadapan peserta IGGI pada khususnya dan di mata internasional pada umumnya<sup>74</sup>.

Dengan latar belakang tersebut pemerintah Indonesia melalui surat menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, Industri dan pengawasan pembangunan, Radius Prawiro, kepada Perdana menteri Belanda R.F.M Lubbers tanggal 24 Maret 1992 meminta kepada Pemerintah Belanda untuk<sup>75</sup> :

- (1) Menghentikan (*terminate*) pencairan (*disbursement*) semua bantuan pembangunan yang sedang dilaksanakan baik dalam bentuk pinjaman maupun hibah dari Belanda kepada Indonesia dengan segera.
- (2) Tidak lagi menyiapkan bantuan baru untuk Indonesia.
- (3) Tidak perlu menyelenggarakan sidang IGGI.

Dalam surat tersebut antara lain di sampaikan bahwa IGGI telah membantu keperluan Indonesia akan pembiayaan pembangunan, pemerintah Indonesia sangat menghargai bantuan dari semua peserta IGGI, khususnya peran pemerintah Belanda dalam menyelenggarakan dan mengetuai sidang IGGI selama dua puluh empat tahun .akan tetapi hubungan antara Indonesia dan Belanda menjadi merosot dengan tajam sebagai akibat penggunaan dana bantuan

---

<sup>74</sup> *Suara Pembaruan*, 2 april 1991, *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*.

pembangunan secara semena mena sebagai alat intimidasi. Penggunaan dana bantuan pembangunan secara semena mena sebagai alat untuk mengancam Indonesia telah mengakibatkan sangat merosotnya hubungan antara kedua negara, sehubungan dengan itu, oleh karena hasrat berlebih-lebih itu untuk menggunakan dana bantuan pembangunan sebagai alat intimidasi tersebut tampak berlanjut maka satu-satunya pilihan yang masih tersedia untuk menghindarkan semakin merosotnya hubungan antara kedua bangsa adalah menghentikan sepenuhnya semua bantuan pembangunan dari Belanda kepada Indonesia<sup>76</sup>.

Pemerintah Indonesia dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Direktur Bank Dunia, Lewis Preston, meminta agar pihak Bank Dunia segera mengambil langkah guna membentuk suatu forum khusus pengganti IGGI. Indonesia yang mengaku sedang memasuki era pembangunan 25 tahun yang kedua, memerlukan bantuan bagi perkembangan ekonominya<sup>77</sup>.

Dalam surat itu diminta pula agar pihak Bank Dunia dapat menyelenggarakan pertemuan guna pembentukan forum tersebut dalam tahun ini juga. Surat itu ditulis oleh Menteri Keuangan RI, J.B. Sumarlin dan diserahkan oleh kurir khusus kepada Gautam Kaji di Washington (DC) Rabu (25/3/1992) siang. "Kami memberitahukan semua pemerintah dan organisasi internasional lainnya guna membantu Indonesia dalam hal ini, antara lain bunyi surat yang ditujukan kepada pimpinan Bank Dunia<sup>78</sup>.

Surat Menkeu Sumarlin kepada Presdir Bank Dunia tersebut, merupakan pelengkap atau tindak lanjut pemerintah Indonesia, sehubungan dengan pembekuan segenap bantuan dari Belanda serta penghentian peranan Belanda dalam IGGI. Pembekuan bantuan serta penghapusan peran Belanda dalam IGGI dikemukakan dalam surat Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Radius Prawiro yang ditujukan kepada kepala pemerintahan Belanda<sup>79</sup>.

Keputusan Pemerintah Indonesia tersebut berarti pembubaran *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI). Selanjutnya pemerintah Indonesia melalui surat Menteri Keuangan, J.B Sumarlin, tanggal 24 Maret 1992 kepada

---

<sup>76</sup> BAPPENAS, *Ibid* hal 6

<sup>77</sup> *Suara Pembaharuan*, 2 April 1992

<sup>78</sup> *Ibid*.

<sup>79</sup> *Ibid*

president Bank Dunia meminta lembaga tersebut untuk membentuk *Consultative Group on Indonesia* ( CGI ). Melalui surat itu pula Pemerintah Indonesia meminta Bank Dunia sebagai koordinator CGI<sup>80</sup>.

Menanggapi permintaan tersebut, Bank Dunia melalui surat *Board of Directors*. Tanggal 8 April 1992 kepada Menteri Keuangan Indonesia menyatakan bahwa pada prinsipnya Bank Dunia dapat menerima permohonan Pemerintah Indonesia<sup>81</sup>.

Kebijakan untuk membubarkan IGGI dengan latar belakang seperti tersebut setidaknya dapat diartikan sebagai pelaksanaan amanat GBHP (Tap MPR No II / MPR / 1988) yaitu pinjaman luar negeri sebagai unsur pelengkap dana pembiayaan dapat di terima sepanjang tidak ada ikatan politik, syarat-syaratnya tidak memberatkan dan dalam batas kemampuan untuk membayar kembali<sup>82</sup>.

Pertemuan pertama CGI diadakan di Paris, Prancis pada tanggal 16-17 Juli 1992. Pada pertemuan tersebut hadir 19 negara dan juga 13 lembaga keuangan dan pembangunan multilateral/internasional.<sup>83</sup> Selanjutnya, CGI yang di ketuai oleh Bank Dunia (*World Bank*) sejak tahun 1992 sehingga tahun 2004 bersidang dua kali dalam setahun. Pada tahun 2004, kepemimpinan CGI berpindah ke pemerintah Indonesia.<sup>84</sup> Peserta anggota pertemuan CGI, baik dari negara (bilateral) maupun lembaga keuangan Internasional (multilateral), hingga tahun 2003 dapat dilihat dari tabel 2.1.

---

<sup>80</sup> Bappenas, Ibid, hal 5

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> BAPPENAS, Ibid . Hal 5-6.

<sup>84</sup> *Ibid*

Tabel 2.1

Peserta Pertemuan Consultative Group for Indonesia sampai dengan Pertemuan ke - 12 , Januari 2003	
Bilateral	Multilateral
1. Amerika Serikat	1. Bank Dunia (Internasional Bank for Reconstruction and Development / Internasional Development Association)
2. Australia	2. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank – ADB)
3. Austria	3. Lembaga-lembaga dalam naungan PBB:
4. Belanda	a. Food and Agricultural Organization (FAO)
5. Belgia	b. International Labor Organization (ILO)
6. Denmark	c. UNAIDS
7. Finlandia	d. United Nations Development Program (UNDP)
8. Inggris	e. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
9. Indonesia	f. United Nations Population Fund (UNFPA)
10. Italia	g. United Nations Children Fund (UNICEF)
11. Jepang	h. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
12. Jerman	i. World Food Program (WFP)
13. Kanada	
14. Korea Selatan	
15. Norwegia	
16. Portugal	
17. Perancis	
18. Selandia Baru	
19. Spanyol	
20. Swedia	
21. Swiss	

	<p><b>j. World Health Organization (WHO)</b></p> <p><b>4. European Union</b></p> <p><b>5. European Investment Bank (EIB)</b></p> <p><b>6. International Finance Corporation</b></p> <p><b>7. International Monetary Fund (IMF)</b></p> <p><b>8. Islamic Development Bank (IDB)</b></p> <p><b>9. Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED)</b></p> <p><b>10. Nordic Investment Bank (NIB)</b></p> <p><b>11. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)</b></p> <p><b>12. Saudi Fund for Development</b></p>
--	--

Sumber : Bappenas, 2003

## **A. 2 . CGI SEBAGAI AID COORDINATION**

CGI (*Consultative Group on Indonesia*) merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga-lembaga kreditor dan donor untuk Indonesia yang dibentuk pada tahun 1992 sebagai pengganti konsorsium yang sama yaitu IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*). CGI terdiri dari sekitar 30 kreditor bilateral dan multilateral diantaranya *World Bank (WB)*, *Asian Development Bank (ADB)*, *International Monetary Fund (IMF)*, dan pemerintahan-negara industri seperti Jepang, Amerika Serikat, United Kingdom dan lain-lain.<sup>85</sup>

CGI sejak tahun 1992. adalah kelompok donor dipimpin Bank Dunia yang memberikan pinjaman dan hibah kepada negara yang mengajukan permohonan. Kelompok konsultatif berperan sebagai kordinator donor/kreditor dan sebagai wahana untuk bekerja dengan negara yang memohon untuk memusatkan perhatian pada bidang-bidang pokok tertentu. Kelompok konsultatif biasanya bertemu sekali setahun. Jika di beberapa negara yang mengalami masalah serius, pertemuan

<sup>85</sup> Down to Earth, Factsheet No.32 Maret 2004, *CGI: Jalan Pintas atau Jalan Lain?*, hal 1.

fiskal berikutnya<sup>86</sup>. Dalam pertemuan kelompok konsultatif, negara dan lembaga donor memaparkan keprihatinan dan mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara pemohon agar pinjaman dan hibah dapat diberikan.

Sebaliknya, negara pemohon menjelaskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun fiskal sebelumnya dan langkah-langkah kebijakan yang akan mereka tempuh dalam tahun fiskal berikutnya<sup>87</sup>. Forum ini di bentuk untuk 1) Mendukung pemerintah RI dalam pembiayaan program-program pembangunan (dalam bentuk pemberian hibah atau pinjaman untuk menutup defisit anggaran) dan 2) meningkatkan Kordinasi antara pemerintah RI dengan para donor dan kordinasi antar donor sehingga bantuan yang di berikan dapat berjalan harmonis, efektif dan efisien<sup>88</sup>.

CGI merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga kreditor dan donor untuk Indonesia (*Aid Coordination*) yang dibentuk pada tahun 1992 sebagai pengganti konsorsium yang sama yaitu *Inter-Govermental Group on Indonesia* (IGGI)<sup>89</sup>. *Aid Coordination* pada dasarnya merupakan proses perencanaan bantuan internasional sehingga bantuan tersebut mampu mendukung strategi, prioritas, dan tujuan nasional (negara penerima), menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta meminimalkan beban bantuan kepada penerima. Tangung jawab atas koordinasi pada dasarnya berada pada negara penerima. Meskipun demikian donor tetap membantu pemerintah negara penerima dalam mengelola proses koordinasi bantuan agar berjalan efektif. Dukungan donor di perlukan karena masih terbatasnya kapasitas administrasi negara penerima<sup>90</sup>.

*Development Assistance Commite–Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah menyusun serangkaian prinsip bagi suatu *aid coordination forum*, antara lain :

- (1) Kerjasama pembangunan seharusnya di tempatkan pada tataran atau area yang lebih luas dari pada sekedar urusan proyek (*Project Level*).

---

<sup>86</sup> Down to Earth *Ibid*.

<sup>87</sup> Down to Earth, Factsheet No 19, Edisi Khusus CGI, *Consultatif Group on Indonesia (CGI): Desakan untuk Bertindak*, 2001, hal 1

<sup>88</sup> Presentasi Kurniawan Ariadi, "Pemantapan Kebijakan Pengelolaan Pinjaman Luar negeri pemerintah selepas CGI", *Kebijakan pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah selepas CGI* Makalah dalam Diskusi terbatas Bank Indonesia, 26 April 2007.

<sup>89</sup> BAPPENAS, *Op.Cit.*, hal 1

<sup>90</sup> *Ibid*, hal 2

- (2) *Aid Coordination* yang efektif menghendaki adanya pengelolaan sumber-sumber daya domestik dan eksternal yang termasuk atau melibatkan juga pengelolaan yang memadukan sumber daya yang dimiliki sector swasta dan masyarakat.
- (3) Semua sumber daya pembangunan harus benar-benar di kelola dengan baik sehingga memungkinkan terciptanya lingkungan yang mantap. Dialog antara pemerintah dan mitra dari luar (*external partners*) yang baik dalam hal *good and sound governance* menjadi suatu kerangka prasarat bagi *aid coordination*.
- (4) Donor harus menawarkan program bantuan kepada negara penerima untuk Pengembangan kapasitas lembaga-lembaga nasional/pemerintah dalam rangka mengefektifkan pengelolaan bantuan<sup>91</sup>.

*Aid coordination group* umumnya memfokuskan pada tiga area yakni :

- (1) Kerangka ekonomi umum ( *General Economic Framework* )
- (2) Isu-Isu sektoral ( *Sectoral Issue* )
- (3) *Project Issue*<sup>92</sup>.

Beberapa negara berkembang menilai *Aid Coordination* sebagai sesuatu yang mangancam kepentingan nasional mereka. Di sisi lain, mereka juga terkadang memanfaatkan kurang rapuhnya koordinasi antar donor untuk meningkatkan jumlah bantuan dan menjadikanya sebagai peluang untuk menggunakan bantuan sesuai dengan kepentingan dan preferensi mereka sendiri<sup>93</sup>.

Pihak donor tidak dapat menghindari dari penilaian campur tangan terhadap kebijakan negara penerima terlebih bila forum kordinasi bergerak pada tataran kebijakan dialog kebijakan. Selain itu terdapat keengganan di pihak donor untuk secara terbuka bertukar informasi mengenai kebijakan dan program-program mereka lebih disebabkan kepentingan komersial/bisnis mereka<sup>94</sup>.

Di bawah pimpinan Bank Dunia, yang men-*drive* mekanisme kerja dan agenda-agenda kerja CGI. Kita bisa melihat bahwa selama lima tahun terakhir ini, agenda yang dibahas dan dikerjakan CGI telah melebar sedemikian rupa. Agenda

---

<sup>91</sup> BAPPENAS, *Ibid*, hal 2.

<sup>92</sup> *Ibid*.

<sup>93</sup> *Ibid*, hal 3.

<sup>94</sup> *Ibid*.

yang ada nampaknya tidak dapat terlepas dari perkembangan situasi dan kondisi global yang berkembang. Permasalahannya apakah agenda-agenda tersebut memang relevan dan sesuai dengan prioritas-prioritas pembangunan nasional atau justru lebih mencerminkan prioritas dan kepentingan para kreditor dan donor. Berbagai komentar dan kritik yang disampaikan oleh peserta sidang CGI tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, keuangan dan perbankan melainkan juga menyangkut masalah-masalah non ekonomi seperti politik, hukum, sosial, lingkungan hidup maupun isu-isu keamanan<sup>95</sup>.

Seperti halnya dengan IMF, selama ini Indonesia memerlukan CGI untuk memperoleh utang yang akan dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran (APBN). Oleh karena itu, pertemuan CGI adalah bagian dari ritual yang biasanya dilakukan dalam masa-masa ketika pemerintah akan menyusun rencana anggaran (RAPBN)<sup>96</sup>.

Adanya kordinasi donor juga bertujuan untuk mendukung penuh suatu program deregulasi. Sehingga jika suatu program tidak dijalankan oleh negara peminjam seperti yang terjadi pada Indonesia, maka kucuran akan ditunda atau dibatalkan sama sekali. Langkah ini tentunya didukung oleh donor yang lainnya dengan langkah yang sama<sup>97</sup>. IMF beberapa kali menunda pencairan pinjaman pada Indonesia pada awal krisis karena Indonesia menolak persyaratan dari IMF untuk reformasi yang diinginkan. Maka dalam waktu yang sama pula ADB melakukan penundaan pencairan<sup>98</sup>.

Dalam forum CGI ini, pemerintah Indonesia menyampaikan pemajuan pembangunan, permasalahan yang di hadapi Indonesia dan rencana pembangunan pada tahun berikutnya serta anggaran yang butuhkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Anggota anggota CGI yang menyampaikan kesanggupan bantuan (*pledge*) yang akan di berikan sebagai dukungan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Namun kesanggupan ini tidak serta merta menjadi Komitmen dari negara-negara tersebut untuk memberikan bantuan, karena tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia masih harus melakukan loby

---

<sup>95</sup> Ceppie Kurniada Sumadilaga, *Op.Cit.*, hal 3.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Suara Karya*, 11 Maret 1998.

<sup>98</sup> *Suara Pembaruan*, 21 April 1999.

pada satu persatu negara. Tidak jarang karena ketidak sepakatan dalam proyek dan syarat syarat, antara donor atau kreditor dan Indonesia sebagai negara penerima uang/bantuan, kesanggupan (pledge) tersebut tidak terealisasi<sup>99</sup>.

Selama sepuluh tahun keberadaanya, CGI telah berperan dalam menopang proses dan pembiayaan pembangunan Indonesia melalui berbagai bantuan dan utang yang di berikan. Dalam perkembangannya terlebih sejak krisis multidimensi yang menimpa Indonesia akhir dasawarsa 1990an terdapat pergeseran dan perubahan dalam forum tersebut.mencakup mekanisme kerja, agenda dan isu yang di bahas dalam pertemuan, skema beserta persyaratan pinjaman dan hibah yang di berikan<sup>100</sup>

Berbeda dengan keanggotaan Indonesia dalam IMF dan IBRD atau keanggotaan Indonesia dalam *Asian Development Bank*, yang di sahkan dengan undang undang. Keikut sertaan Indonesia dalam IGGI ataupun CGI yang di anggap sebagai forum dialog kebijakan ini tidak di bangun berdasarka relasi kesetaraan. Rekomendasi atau bahkan tuntutan yang disampaikan dalam forum dialog kebijakan tersebut memiliki daya tekan yang mampu mengubah arah pembangunan dan kebijakan Indonesia<sup>101</sup>.

Delegasi Indonesia pada setiap pertemuan CGI dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan anggota Menteri/kepala BAPPENAS, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan pejabat senior dari instansi–Instansi tersebut dan dari Departemen Luar negeri. Dalam perkembangannya kemudian anggota kabinet yang lainnya juga turut serta sesuai dengan perkembangan agenda pertemuan<sup>102</sup>.

Peserta CGI bilateral umumnya di pimpin oleh duta besar atau pejabat senior kedutaan besar mereka di Jakarta, atau pejabat senior (setingkat eselon 1) pada kementerian yang bertanggung jawab atas kerjasama pembangunan. Sedangkan peserta multilateral di pimpin oleh pejabat yang menangani *desk* Indonesia pada lembaga/ organisasi yang bersangkutan<sup>103</sup>.

---

<sup>99</sup> Dian Kartika Sari, *Aspek hukum "Loan Agreement" sebagai bagian dari hukum publik*, INFID, Jakarta, 2007, hal 59.

<sup>100</sup> BAPPENAS, *Op.Cit*, hal 1.

<sup>101</sup> Dian Kartika Sari, *Op.Cit*, hal 60.

<sup>102</sup> BAPPENAS, *Ibid*, hal 10.

<sup>103</sup> *Ibid*.

## **B. PENERAPAN MAZHAB NEOLIBERALISME**

### **B.1 KONSENSUS WASHINGTON**

Gagasan pokok neoliberalisme dapat dipahami sebagai penyempurnaan ide dasar dari liberalisme klasik tersebut. Pemikir yang sering dianggap sebagai penggagas neoliberalisme (sebagai ide-ide sistematis) adalah Alexander Rustow, yang kemudian disempurnakan oleh para ekonom mazhab Chicago dan Mazhab Freiburger. Perbedaan yang paling mendasarnya dengan liberalisme klasik adalah tentang pembentukan harga pasar yang ternyata tidak bersifat alami, melainkan memerlukan campur tangan negara. Namun, penertiban pasar yang dilakukan negara itu adalah neoliberalisme sebagai bentuk mutakhir kapitalisme abad 21 melalui penerbitan peraturan perundang-undangan. Perlu dicatat bahwa maksudnya adalah agar mekanisme pasar bisa segera terbentuk dan operasional, tidak terintangi oleh faktor kelembagaan (seperti pranata sosial)<sup>104</sup>.

Salah satu ide terpentingnya, yakni pengurangan peran negara dalam perekonomian, mendapat momentum penerapan di negara industri dan di negara terbelakang. Kinerja perekonomian yang memburuk di berbagai negara (secara bersamaan maupun dengan sedikit perbedaan kurun waktu) dianggap disebabkan oleh kegagalan pemerintah (*government failures*). Yang disoroti di negara industri adalah soal membengkaknya pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan defisit berkepanjangan, serta persoalan derivatifnya seperti: inefisiensi birokrasi dan efek kontraksi bagi investasi swasta (*crowding out*). Sedangkan di negara berkembang, soalnya diperparah oleh berbagai krisis yang dialami, seperti : krisis utang, krisis moneter, krisis neraca pembayaran internasional, dan lain sebagainya<sup>105</sup>.

Neoliberalisme merupakan basis ideologi paling penting yang memberi legitimasi bagi kapitalisme global dalam tiga dekade terakhir yang memulihkan kelas kekuasaan pemilik modal. Secara garis besar neoliberalisme adalah semacam pendekatan ekonomi politik yang memperjuangkan kesejahteraan umat manusia melalui proses pembebasan individu dari setiap macam kekangan. Kemerdekaan individu dalam hal ini hanya bisa dijamin melalui kerangka kelembagaan yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak milik pribadi. Pasar bebas dan perdagangan bebas. Negara bertugas menciptakan dan mempertahankan

---

<sup>104</sup> Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Ibid*, hal 231-232

<sup>105</sup> *Ibid*.

kerangka kelembagaan yang sesuai untuk itu. negara, misalnya, harus menjamin kualitas dan integritas uang dengan berbagai fungsinya. Negara harus membangun sistem pertahanan, membentuk militer dan polisidan fungsi-fungsi taerkait lainnya untuk mengamankan hak milik pribadi dan menjamin, jika perlu dengan paksa, beroperasinya pasar secara optimal<sup>106</sup>.

Menurut prespektif neoliberal, cara terbaik untuk memberantas kemiskinan adalah dengan penyesuaian (yang lebih cepat) terhadap ketidakseimbangan fiskal, inflasi dan defisit eksternal yang lebih rendah melalui penerapan tingkat bunga yang lebih tinggi; liberalisasi sektor keuangan internal dan eksternal; deregulasi terhadap pengendalian modal, swastanisasi yang cepat dan menyeluruh terhadap perusahaan milik negara; serta membuka perekonomian secara cepat dan menyeluruh terhadap perdagangan dan invetasi global<sup>107</sup>.

Konsensus Washington dikenal juga sebagai nilai-nilai dasar dari neoliberalisme ekonomi yang menyelinap dalam globalisasi. Globalisasi dalam rangka penyebaran neoliberalisme itu memperlihatkan 2 (dua) dimensi yakni, pertama dimensi ekonomi dan korporasi (economic and corporation globalization). Kedua, dimensi politik dan negara (political and state globalization).<sup>108</sup> Kedua dimensi tersebut nampak pada kebijakan yang diskenariokan dan didesain oleh negara-negara maju yang tergabung dalam G8 (Amerika Serikat, Kanada, Italia, Perancis, Inggris, Jerman, Rusia, dan Jepang) melalui 3 (tiga) mesin globalisasi yaitu, pertama lembaga keuangan internasional (International Financial Institutions/IFI's), kedua Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), dan ketiga perusahaan multinasional (Multinational Corporation/MNC).

Konsensus Washington atau neoliberalisme menekankan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi sebagai imperatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan kemiskinan. Dalam pencapaian pertumbuhan tersebut paradigma meletakkan prioritas pada penambahan input kapital dan tenaga kerja semata-mata, di mana

---

<sup>106</sup> Eric Hiariej, *Pemulihan Kekuasaan Kelas Dominan dan Politik Neoliberalisme*, Jurnal Politik Internasional GLOBAL, Dept. Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Vol.9 No.2 Desember 2007-Mei 2008, hal 126.

<sup>107</sup> Rai Kanbur, *Economic Policy, Distribution and Poverty: The Nature of Disagreements*. Cornell University. Public Lecture, Juni, 2001, hal 4.

<sup>108</sup> M. Ridha Saleh, *Ecoside : Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, 2005, hal. 50.

faktor kemajuan teknologi dipandang sebagai faktor eksogen dan mengabaikan faktor-faktor di luar ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Melalui pertumbuhan ekonomi ini diyakini akan terjadi apa yang disebut sebagai *trickle down effect*, efek penetesan ke bawah, dimana pertumbuhan ekonomi akan meneteskan kesejahteraan ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin juga akan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ini<sup>109</sup>.

Ketika negara-negara Amerika Latin terutama tiga negara yang paling berpengaruh yaitu Meksiko, Brazil, dan Argentina bangkrut pada pertengahan 1980-an dan paruh pertama 1990-an, IMF, Bank Dunia, dan para ekonom Amerika Serikat yang bermarkas di Washington meracik obat generik untuk mengatasinya. Oleh ekonom John Williamson resep generik ini diberi nama Konsensus Washington, yang praktis dihasilkan oleh para ekonom beraliran liberal dan konservatif. Semula resep ini didesain untuk menangani Amerika Latin, Tetapi kemudian terfikir, negara-negara berkembang lainnya pun bisa mengaplikasikannya<sup>110</sup>.

Konsensus Washington dicetuskan kali pertama oleh John Williamson, seorang ekonom dari *Institute of International Economics* (IIE) di Washington DC, pada 1989, konsep berupa serangkaian kebijakan reformasi (ekonomi) itu merupakan rekomendasi Williamson untuk mengatasi krisis ekonomi di Amerika Latin. Williamson merekomendasikan sepuluh kebijakan dasar yang harus di tempuh negara-negara Amerika Latin untuk mengatasi krisis. Rekomendasi itu diterima luas oleh para ekonom Amerika Serikat, termasuk Departemen Keuangan dan *Bretton Woods Institutions* (Bank Dunia dan IMF), yang kemudian dijadikan standar kebijakan mereka<sup>111</sup>.

Sebagaimana diketahui subsidi yang diberikan kepada sektor publik selama ini dituding sebagai biang keladi meningkatnya pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan defisit anggaran. Setelah John Williamson mengagas Konsensus Washington, yang menganjurkan stabilisasi ekonomi lewat kontrol penyediaan mata uang dan perluasan pertumbuhan dengan seperangkat ukuran

---

<sup>109</sup> Stiglitz, *op. cit* hal 53

<sup>110</sup> A, Toni Prasetyantono, *Mengugat Konsensus Washington*, Kompas, 25 September 2006.

<sup>111</sup> John Williamson, *What Should the World Bank Think about Washington Consensus* " dalam *The World Bank Research Observer*, Washington DC : IBRD / The World Bank, No 2, Vol 15, 2000.

yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas sektor swasta. Kebijakan privatisasi pun menjadi kebijakan standar Bank Dunia dan IMF diikuti Bank-Bank Pembangunan regional seperti *Asia Development Bank*, *Inter-Amerika Development Bank*, *Africa Development Bank*, dan *European Bank for reconstruction and Development*. Yang mayoritas sahamnya di miliki oleh Negara-negara anggota G7. Dengan prinsip “*one dollar one vote*“, negara negara kaya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang, mendominasi keputusan, kebijakan, dan strategi di dalam institusi-institusi tersebut<sup>112</sup>.

Konsensus ini terdiri atas 10 (sepuluh) elemen yang bisa di rangkum menjadi tiga pilar, (1) disiplin anggaran pemerintah (2) liberalisasi pasar (*market liberalization*) (3) Privatisasi BUMN<sup>113</sup>. Secara singkat, isi konsensus Washington yang sering juga di sebut sebagai pendekatan Neoliberal adalah: *Pertama*, disiplin fiskal. Pemerintah di minta menjaga agar anggaranya mengalami surplus. walaupun terpaksa defisit, tidak boleh melampaui dua dua persen terhadap Product Domestik Bruto (PDB), *Kedua* memberikan prioritas kepada belanja sektor publik, terutama di sector pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya memperbaiki distribusi pendapatan. *Ketiga* memperluas basis pemunggutan pajak agar dapat di bangun struktur penerimaan anggaran yang sehat. *Keempat* liberalisasi finansial, suku bunga harus di jaga positif secara riil (lebih tinggi dari pada laju finansial). Dan di hindari kebijakan suku bunga yang mengistimewakan debitor tertentu (*preferential interest rates for favored borrows*) *Kelima*, kurs mata uang harus di usahakan kompetitif (tidak terlalu kuat) tetapi kredibel (tidak terlalu lemah). *Keenam* mendorong liberalisasi perdagangan, melalui upaya menghapus restriksi kualitatif (hambatan perdagangan seperti pengenaan tarif, kuota, dan larangan larangan lainnya). *Ketujuh* menerapkan kesamaan perlakuan antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik sebanyak mungkin investasi asing langsung. *Kedelapan* untuk mendorong kinerja badan usaha milik negara (BUMN) seyogyanya di lakukan privatisasi (penjualan saham negara ke sektor privat). *Kesembilan* pasar harus di dorong agar lebih kompetitif melalui serangkaian kebijakan deregulasi dan menghilangkan

---

<sup>112</sup> Sugeng Bahagijo, (Ed). "Globalisasi Menghempas Indonesia", *Sebuah Dogma Ekonomi Bernama Swastanisasi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, hal 144

<sup>113</sup> Stiglitz, *Ibid*, hal 53

hambatan atau restriksi bagi para pelaku ekonomi baru. *Kesepuluh*, harus ada perlindungan terhadap *property right*, baik sektor formal maupun sektor informal<sup>114</sup>.

Diantara sepuluh point tersebut (lihat tabel 2.2), privatisasi, liberalisasi, dan disiplin fiskal merupakan pilar utama untuk mendukung terlaksananya fungsi pasar secara efektif. Menarik dicermati, pendekatan ini disebut konsensus Washington karena proses perumusannya melibatkan para politisi Kongres, teknokrat dan birokrat, pemimpin lembaga financial dan agen-agen ekonomi pemerintah AS yang semuanya berada di Washington. Selain itu, ketentuan ini juga dijalankan oleh lembaga financial seperti IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan AS yang juga berpusat di Washington. Dari proses peruangan AS yang juga berpusat di Washington. Dari proses perumusan dan keterlibatan aktor-aktor didalamnya dapat dilihat bahwa peran dan dominasi AS dalam menerapkan paradigma pasar bebas (*free market paradigm*) sangat dominan di aras global<sup>115</sup>.

Adapun ide dasar yang dikembangkan: Pertama, privatisasi dengan alasan efisiensi. Kedua, pemotongan seluruh pengeluaran publik khususnya anggaran yang dialokasikan untuk layanan sosial. Ketiga, deregulasi, dengan menghapus peraturan pemerintah yang dapat menghambat aktivitas pasar. Keempat, penerapan aturan yang membebaskan swasta dari keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Kelima, menghapus konsep barang public (*public goods*) dengan mengalihkan fungsi tanggung jawab tersebut kepada pasar<sup>116</sup>.

**Tabel 2.2**

**Kebijakan Washington Consensus**

<b>Elemen Kebijakan Washington Consensus</b>	<b>Elemen Kebijakan Washington Consensus</b>
Disiplin fiskal	Deregulasi
Pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur	Liberalisasi perdagangan
Reformasi pajak	Privatisasi
Nilai tukar yang kompetitif	Pembukaan akses terhadap PMA
Jaminan hak kepemilikan	Liberalisasi sektor keuangan

<sup>114</sup> A, Toni Prasetyantono, *ibid*.

<sup>115</sup> Syamsul Hadi et al. "Post Washington Consensus dan Politik Privatisasi di Indonesia." Cet.1, Marjin Kiri, Serpong, 2007), hal 22.

<sup>116</sup> Bonie Setiawan, *Menggugat Globalisasi*, INFID, Jakarta, 2000, hal 8-9.

Program Stabilisasi, liberalisasi, privatisasi tentu bukan program pertumbuhan program tersebut di maksudkan untuk menetapkan prakondisi yang mendukung pertumbuhan sebaliknya, ia malah menetapkan prakondisi yang menimbulkan penurunan. Bukan hanya investasi tertahan, tetapi modal juga terkuras-tabungan menguap karena inflasi, keuntungan-keuntungan privatisasi, di tambah dengan pembukuan pasar modal, berujung bukan pada penciptaan kekayaan tetapi pada penguasaan asset<sup>117</sup>.

Konsensus Washington didasarkan kepada suatu pemahaman yang bias atas pengalaman internasional. Keberhasilan pembangunan dianggap bersumber dari kebijakan pro pasar yang liberal, baik ditingkat domestik maupun internasional, sedangkan semua kegagalan ditimpa pada kurangnya keterbukaan perekonomian serta intervensi pada pasar domestik yang dilakukan pemerintah. Pemahaman ini tidak hanya menolak pesimisme ekspor maupun juga tidak mempercayai adanya *structural underemployment*<sup>118</sup>.

Globalisasi *top down* didorong oleh usaha tak kenal lelah untuk mempromosikan fundamentalisme pasar, upaya terfokus untuk melucuti kemandirian kebijakan ekonomi nasional, kepercayaan membuta terhadap konsep “arena permainan yang setara” (*level of playing field*), dan dorongan berdimensi tunggal untuk menggantikan segala bentuk tindakan kolektif (*collective action*) dengan pertukaran komersial (*commercial exchange*). konsensus Washington telah memberikan pembenaran ideologis atas praktek globalisasi tersebut dengan mengatasnamakan percepatan pertumbuhan dan pemerataan sebaran kemanfaatan pembangunan. Hanya saja, fakta yang berlangsung sepanjang dua dekade terakhir menunjukkan menunjukkan bahwa pertumbuhan telah merosot dan ketidak merataan telah melambung tajam dibandingkan tiga dekade sebelumnya<sup>119</sup>.

Berbeda dengan pandangan keynesian yang menekankan pentingnya peran Negara dalam ekonomi makro, pengusung konsensus Washington berasumsi bahwa keterlibatan entitas negara dalam aktivitas perekonomian dapat

---

<sup>117</sup> Stiglitz. *lok. cit.*, hal 201

<sup>118</sup> .Mohan Rao, “Arbitrase Utang: Penyelesaian Menyeluruh Masalah Utang Luar Negeri”, *Globalisasi, Utang dan Pembangunan: Pelajaran dan Pilihan Kebijakan Bagi Indonesia*, INFID, Jakarta, 2003, hal 4.

<sup>119</sup> Mohan Rao, *Op.Cit.*, hal 27.

menimbulkan distorsi terhadap pasar<sup>120</sup>. Secara umum konsensus Washington kurang memberi perhatian pada ketidakmerataan, ketika kebijakan *Washington Consensus* menekankan pada peran minimal pemerintah, pemerintah negara-negara Asia timur membentuk dan mengarahkan pasar<sup>121</sup>.

## **B.2 STRUCTURAL ADJUSTMENT PROGRAM**

Pada awal tahun 1980-an, di bawah kepemimpinan Robert Mc Namara, Bank Dunia memperkenalkan sebuah program baru yang di kenal sebagai program penyesuaian struktural atau *Structural Adjustment Programme* (SAP). Pinjaman Bank Dunia di berikan untuk periode beberapa tahun melalui program itu untuk mendukung secara langsung reformasi kebijakan dan tidak lagi terkait dengan salah satu program investasi dalam bentuk proyek seiring dengan berlangsungnya perubahan kebijakan di Bank Dunia. Berbagai jenis pinjaman yang di maksud untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang program penting lembaga ini sejak awal hingga akhir tahun 1970-an perlahan lahan berkurang bahkan menghilang dari portofolio pinjaman. Sebaliknya dengan pinjaman yang memuat atau mengandung komponen SAP mulai mendominasi portofolio lembaga itu di ikuti dengan bertambahnya persyaratan bagi negara-negara miskin dan berkembang untuk mendapatkan pinjaman, baik dari Bank Dunia maupun IMF<sup>122</sup>.

IMF dan World Bank menyarankan diberlakukannya SAP yang kental dengan ideologi pasar bebas, perdagangan bebas dan pengurangan peran negara di sektor ekonomi<sup>123</sup>. Persyaratan-persyaratan yang di tentukan oleh kedua lembaga keuangan internasional tersebut bertujuan untuk mereformasi kebijakan ekonomi Negara-negara miskin dan berkembang, sehingga hambatan bagi terbentuknya “pasar sempurna“ yang diyakini sebagai jalur optimal mencapai pertumbuhan dapat di hilangkan. Bank Dunia mempraktekkan SAP pada sisi persediaan ekonomi, sedangkan IMF berkonsentrasi pada sisi permintaan melalui kebijakan-kebijakan stabilisasi. Dengan pembagian kerja semacam itu, Bank Dunia

<sup>120</sup> Wibowo, I., dan Francis Wahono, *Neoliberalisme*, Cindelaras, Yogyakarta 2003, hal 275

<sup>121</sup> Stiglitz, *op.cit.* hal 130-131

<sup>122</sup> Jomo Ks dan Ben Fine (eds), “ From Wasington to Post-Wasihington Consensus “ , *The New Development Economics: After The Washington Consensus* London : Zed Book , 2006.

<sup>123</sup> Syamsul Hadi, *Op.Cit.*, hal 20.

memfokuskan pada liberalisasi ekonomi dengan menghalau pelbagai distorsi yang menghambat terbentuknya mekanisme pasar serta menyingkirkan kendala tabungan dan nilai tukar investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan (ekonomi) yang di harapkan. sementara itu, IMF lebih menitikberatkan kebijakan pada pasokan mata uang, defisit anggaran dan nilai tukar. Akhir tahun 1980-an, Bank Dunia memasukan persyaratan kinerja ekonomi dalam SAP, antara lain inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran<sup>124</sup>.

Pada dasawarsa 1990-an, SAP mengimplikasikan beberapa prinsip konsensus Washington dalam bentuk berbagai program yang didanai oleh lembaga-lembaga tersebut, secara keseluruhan, tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga-lembaga keuangan internasional melalui privatisasi ada tiga macam. *Pertama*, tujuan ekonomi, yaitu meningkatkan efisiensi seluruh sector ekonomi yaitu meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keuntungan perusahaan; meningkatkan kualitas produk dan pelayanan; dan menarik investasi swasta. *Kedua*: Tujuan fiskal yaitu menghapus subsidi pemerintah pada badan usaha milik negara; memperoleh tambahan dana dari penjualan kepemilikan negara atas badan usaha; dan meningkatkan pendapatan pajak dari badan usaha swasta *ketiga*: Tujuan sosial politik, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; mempromosikan kepemilikan badan usaha swasta oleh swasta nasional meningkatkan kepemilikan properti kelas menengah; meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja dan mengurangi korupsi serta penyalahgunaan di kantor kantor publik<sup>125</sup>.

Namun demikian, pada kenyataannya, tidak seluruh tujuan tersebut dapat tercapai, dalam hal efisiensi dan produktivitas badan usaha milik negara sebelum dan sesudah privatisasi, misalnya menunjukkan hasil yang berbeda. dalam hal tujuan fiskal subsidi pemerintah tidak lagi di berikan kepada badan milik negara, tetapi badan usaha swasta yang memberikan pelayanan publik dalam banyak hal meminta subsidi kepada Negara, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat keringanan pajak dan insentif lain. Instrument untuk memengaruhi kebijakan dilakukan melalui mekanisme pinjaman program dan proyek,

---

<sup>124</sup> Jomo Ks dan Ben Fine (eds), *Loc.Cit.*

<sup>125</sup> Saprin, *The Report of Stuctural Adjustment Participation Review International Network* "The Policy Root Of Economic Crisis and Poverty Zed Books, London, 2004.

pinjaman yang diberikan kepada Negara berkembang pun senantiasa diikuti dengan pelbagai persyaratan. Karena negara-negara berkembang pada umumnya sangat membutuhkan dana pinjaman dari Bank Dunia dan IMF selain bank pembangunan regional, untuk menutupi defisit anggaran atau membiayai program pembangunan, maka persyaratan yang di ajukan pun pada akhirnya mendapat dukungan signifikan dari pemerintah masing-masing<sup>126</sup>.

Pada tahun 1992, dewan eksekutif Bank Dunia memberikan mandat kepada manajemen untuk memperkokoh perspektif Bank Dunia tentang sektor swasta dalam *Economic and Social Work*. Bank dunia kemudian menindak lanjutinya dengan *Privat Sector Assessment* (PSA) yang mendiskripsikan sektor swasta di negara bersangkutan, termasuk, hambatan-hambatan yang ada, dan menetapkan cara yang dianggap paling efisien, secara ekonomis untuk menyingkirkan hambatan-hambatan tersebut, sampai dengan pertengahan tahun 1996 sudah diselesaikan 31 PSA, satu di antaranya untuk Indonesia<sup>127</sup>.

Pada awal tahun 1990-an privatisasi menjadi kebijakan kunci Bank Dunia. Bahkan dalam sebuah konferensi Bank Dunia yang di selenggarakan pada tahun 1992 menyimpulkan bahwa “privatisasi telah memberi dampak menguntungkan secara substansial “ dalam bentuk peningkatan PDB secara permanen lebih lanjut dinyatakan dalam laporan Bank Dunia tersebut:

*These gains are only attainable, however, if privatisation is properly done, And “ properly done “ means that policymakers provide no special consencione or privilege when selling public enterprises, intodusce competition wherever possible, and regulate monopolies”<sup>128</sup>*

*Privat Sector Assessment* merupakan *rood map* Bank Dunia dan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan *The competitiveenes framework*. Kerangka kebijakan hukum yang mempengaruhi keputusan bisnis , yang menurut pihak Bank Dunia merupakan kunci untuk mengembangkan sektor swasta (*Private Sectore Development PSD*) fokus utama Bank Dunia dalam PSD adalah

---

<sup>126</sup> Nancy Brune, Greorgy Granet dan Brues Kogute, *The International Monetary Fund and The Global Spread of Privatization*, MF Staff Paper, Washington DC, No 2 , Vol 51, 2004.

<sup>127</sup> Lihat World Bank: Annual report 1996, (diakses dari <http://www.worldbank.org/html/extpb/annrep96/wbar07a.htm>).

<sup>128</sup> Ahmed Galal dan Mary Shirley (eds.) *Does privetizatione delivers ? Highlights From a World bank Conference* ,The Word Bank, Washington DC, 1994.

partisipasi Swasta dalam penyediaan invrastuktur (*Private Provisione on infrastructure*) dengan di infestasi asset-asset sektor publik melalui privatisasi<sup>129</sup>.

Melalui IBRD dan IDA, Bank Dunia memberikan pinjaman kepada negara berkembang, dengan skema kegiatan, antara lain : pinjaman sesuai struktural (SALs) biasanya di kordinasikan bersama IMF, pinjaman penyesuaian sektoral (SECALS), pinjaman investasi, pinjaman bantuan teknis (TALs), pinjaman belajar dan inovasi (LILs), pinjaman program dapat di sesuaikan (APLs), pinjaman rekonstruksi darurat (ERLs), Pinjaman pengurangan utang dan pembayaran utang (DDSR), pinjaman perantara Keuangan (FILs) dan jaminan. di Indonesia. Skema jenis kegiatan ini sangatlah tidak jelas, karena kurangnya transparansi pihak pemerintah<sup>130</sup>.

Beberapa dilema yang di hadapi negara negara berkembang sebagai konsekuensi logis menerima bentuk pinjaman yang diberikan IMF dan /atau *World Bank* tersebut yaitu (1) Tuntutan-tuntutan yang diberlakukan terhadap negara berkembang ketika menerapkan kebijakan *structural adjustment* merupakan bentuk baru dari imprialisme kapitalis. Ini disebabkan negara berkembang berada pada posisi yang lemah terhadap negara maju akibat kebutuhan mendesak akan bantuan finansial. Negara berkembang dalam hal ini tidak memiliki posisi tawar atas ketentuan kondisionalitas yang di tetapkan bersamaan dengan dikucurkannya bantuan yang diberikan. Ini dikarenakan negara kreditor memiliki kesatuan lebih kuat dibandingkan negara debitor dalam melakukan tekanan-tekanan; dan di tingkat internasional pun belum terdapat kesatuan antar negara debitor untuk memperjuangkan posisi tawarnya karena alasan perbedaan kepentingan dan tingkat ketergantungan terhadap kreditor (2) Keharusan bagi negara berkembang untuk melakukan deregulasi dan privatisasi ekonomi dan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi industri substitusio impor menjadi strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi ekspor; termasuk melakukan langkah *prudent* atas fiskal dan kebijakan moneter untuk menghindari inflasi sering kali mengabaikan karakteristik pembangunan ekonomi lokal dan justru melemahkan

---

<sup>129</sup>World Bank, *Bureaucrats in Business, The Economic and Politics of Government Ownership* Oxford University Press. 1995

<sup>130</sup>Rivani Noor, *CGI Lorong Waktu Menuju jerat Hutang*, dalam makalah “Dialog Publik : CGI Apakah di perlukan “ Jakarta , Desember 2003, hal 2.

proses reformasi ekonomi. Akan tetapi, kelompok di tingkat domestik yang kuat secara ekonomi tetap berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintahannya untuk mempertahankan utang dan menganggap tidak ada masalah dengan utang luar negeri karena umumnya kelompok inilah yang memproses akses dan diuntungkan dengan kucuran utang. (3) Tuntutan dari kreditor atas negara debitor untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari masalah korupsi lebih merupakan wacana dari pada implementasi pada dataran praksis dan kebijakan<sup>131</sup>.

## C. AGENDA PEMBAHASAN DAN KONDISONALITAS CGI.

### C.1 KELOMPOK KERJA CGI.

Sejak tahun 2000, terdapat perubahan yang cukup signifikan pada putaran pertemuan CGI, Para anggota CGI tidak lagi bertemu sekali setahun melainkan dua kali yaitu forum *mid-term review/interim meeting* dan pertemuan tahunan. Sesuai dengan namanya *mid-term review/interim meeting*, dipergunakan untuk membahas progress kesepakatan pada pertemuan CGI sebelumnya yang membahas perkembangan terakhir kinerja perekonomian Indonesia. Sedangkan pada pertemuan tahunan selain membahas agenda yang sama, Pada pertemuan ini para peserta CGI menyampaikan *pledge*. Perubahan yang lain, sejak pertemuan CGI bulan Februari 2000 di Jakarta, Organisasi non pemerintah turut di undang mereka di berikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka pada forum tersebut.<sup>132</sup>

Pertemuan CGI di Tokyo merupakan pertemuan yang paling “demokratis”. Karena kalangan NGO diundang dan boleh memberikan komentar<sup>133</sup>. Sejak tahun 2000 kelompok masyarakat sipil diundang sebagai pengamat.<sup>134</sup> Dalam pertemuan tersebut, pengamat kelompok masyarakat sipil membawakan kertas posisi (pernyataan sikap) seperti yang dilakukan pula oleh kelompok pemerintahan atau

<sup>131</sup> Dewi Sinorita Sitepu, *Utang Luar Negeri dan Problemk kemiskinan Negara Berkenmabang*, Jurnal Gobal (Departemen HI FISIP UI, Depok, November 2005, Hal 8

<sup>132</sup> Bappenas, *Loc.Cit* hal 10.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Rizal Ramli, Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, pemimpin delegasi Indonesia pada pertemuan CGI ke 10, Jakarta, 21 November 2008, pkl 19.10 Wib

<sup>134</sup> FIK (*Forum Informasi Komunikasi Etika*), Sulawesi Selatan WIM (*Wahana Informasi Masyarakat*), Medan, Sumatra Utara IDE (*Indonesian Institute for Democracy Education*), Jakarta INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*), Jakarta Forest Watch Indonesia, Bogor, Jawa Barat Telapak Indonesia EIA (*Environmental Investigation Agency*) *Conservation International*

LKI yang hadir di sana. Beberapa negara peminjam mengizinkan kelompok masyarakat sipil berpartisipasi dalam pertemuan kelompok konsultatif untuk memperlihatkan adanya demokrasi di negara mereka. Pertemuan kelompok konsultatif adalah sebuah arena yang dapat digunakan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mengungkapkan sikap mereka dan menjalin hubungan dan memberi pengaruh terhadap pemerintah mereka dan para donor<sup>135</sup>.

Sebagai kelanjutan pertemuan bulan Oktober 2000, CGI telah membentuk 9 (Sembilan) kelompok kerja (*Working Group*) sesuai dengan isu yang di bahas pada pertemuan tersebut, kesembilan kelompok kerja tersebut adalah:<sup>136</sup>. Desentralisasi, Pengurangan Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan Kehutanan, Reformasi hukum dan *Governance*, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Keberlanjutan Fiskal (*Fiscal sustainability*) sampai tahun 2001 / 2002 dan Efektifitas penggunaan bantuan (*Foreign aid effectiveness*)<sup>137</sup>.

*Working group* tersebut pada dasarnya di bentuk sebagai forum tukar pikiran untuk menindak lanjuti pembahasan dan kesepakatan dalam pertemuan CGI. Dalam kelompok kerja tersebut disusun agenda (*action program*) yang perlu di lakukan pihak Indonesia. *Working group* di jadwalkan mengadakan review meeting secara berkala. Dalam pertemuan ini pihak Indonesia diminta menyampaikan pelaksanaan agenda yang telah di dsepakati (semacam *Progress report atas action program*)<sup>138</sup>.

Pada pertemuan CGI, hasil-hasil kerja *Working group* tersebut di laporkan kepada sidang oleh masing-masing kordinator (pihak kreditor / donor) di sertai dengan pandangan dan saran saran mereka tentang kebijakan yang di ambil Pemerintah Indonesia. Pada pertemuan CGI itu pula, Pemerintah Indonesia memaparkan kepada sidang mengenai kebijakan kebijakan yang telah di ambil Pada masing masing isu dan memberikan tanggapan atas pertanyaanya dan saran dari peserta pertemuan CGI<sup>139</sup>.

---

<sup>135</sup> *Down to Earth, Lo, Cit.*

<sup>136</sup> BAPPENAS, *Ibid* hal 12

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> *Ibid.*

Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan “tidak adanya kesetaraan“ dalam kelompok kerja tersebut yaitu :

- (1) Kelompok kerja juga di pimpin oleh lembaga / negara kreditor / donor
- (2) Kurangnya pihak Pemerintah Indonesia yaitu lemahnya koordinasi antar instansi terutama pada kelompok kerja lintas sector (*cross cutting*), Tidak adanya konsistensi keterlibatan pejabat dalam kelompok kerja dalam arti perwakilan yang di tugaskan instansi- instansi terkait selalu berganti sehingga informasi yang di sampaikan kepada pimpinan tidak dapat komprehensif, dan kurang atau rendahnya prakarsa pihak Indonesia dalam bahasan agenda kelompok kerja.

Sebagai akibatnya pelaksanaan kerja kelompok- kelompok kerja lebih banyak di atur oleh pihak kreditor. Selanjutnya agenda – agenda yang disusun ataupun isu yang di bahas lebih banyak memprioritaskan kepentingan pihak kreditor.<sup>140</sup>

CGI selalu membahas masalah kemiskinan dalam CGI meeting. Bahkan ada CGI *Working Group on Proverty*. Namun CGI salah mendiagnosa persoalan-persoalan kemiskinan bahkan terlalu menyederhanakan masaalah. Menurut CGI, masalah utama kemiskinan adalah korupsi/salah kelolah negara. Padahal persoalan kemiskinan lebih structural ketimbang hanya korupsi, tetapi juga masalah distribusi dan akses serta beban hutang yang berlebih. Solusi CGI juga tidak jauh berbedah dari paradigmanya yang mengelu-elukan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan bisa diatasi dengan investasi<sup>141</sup>

Hasil yang di capai dalam kelompok kerja adalah kesepakatan bersama antar lembaga pemerintah dengan pihak kreditor, namun kebijakan yang di ambil bukan merupakan keputusan pemerintah Indonesia sendiri.<sup>142</sup>

Kreditor juga dominan dalam kelompok kerja karena kelompok ini dipimpin langsung lembaga atau negara kreditor, sementara pemerintah Indonesia tidak siap dalam berbagai hal. Misalnya lemahnya koordinasi antar instansi

---

<sup>140</sup> BAPPENAS, Ibid.

<sup>141</sup> INFID, “Kertas Posisi”, *INDONESIA :14 Tahun Dalam Cengkeraman CGI Tertindas Dan Dimiskinkan*, 2006, HAL 5

<sup>142</sup> Drajatd H Wibowo Dkk, *Jebakan Utang dan Solusinya*, INFID. Cetakan I, Jakarta, April 2006, hal 28.

terutama pada instansi lintas sektor, tidak konsistennya keterlibatan pejabat dalam kelompok kerja karena pergantian pejabat yang di tugaskan berbeda beda dalam setiap sidang, dan kurangnya prakarsa pihak Indonesia dalam bahasan agenda agenda kelompok kerja. Tidak menghaerankan jika agenda dan isu yang di bahas dalam sidang sidang CGI lebih banyak diwarnai isu yang mengedepankan kepentingan pihak kreditor<sup>143</sup>.

## C. 2 CGI DAN KONDISIONALITASNYA

Beban utang negara negara berkembang yang semakin berat, tingkat bunga yang semakin tinggi dan terjadinya resesi ekonomi menyebabkan peran utang berubah pada era 1980-an. Pada dekade tersebut, keseimbangan eksternal (neraca pembayaran) dan internal (anggaran pemerintah) menjadi tujuan dan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Peran utang pada kurun waktu tersebut berubah secara drastis, yaitu untuk menyelamatkan sistim keuangan internasional yang rentan dan memastikan pelaksanaan kebijakan kebijakan penyesuaian struktural (*structural adjustment*) yang tepat dengan penyisipan persyaratan persyaratan (*conditionalities*) di dalam paket pinjaman<sup>144</sup>.

Maksud penggantian IGGI dengan CGI adalah mengurangi campur tangan dan tekanan yang menggunakan utang sebagai alat tawar. Diharapkan CGI dapat mengkoordinasikan bantuan utang berdasarkan agenda pembangunan Indonesia, tanpa melakukan campur tangan dalam kebijakan dan politik, kenyataanya, peran tersebut hanya berlaku di awal awal tahun CGI bekerja. Tekanan, "rekomendasi" dengan sandera pemberian utang mulai menguat sejak krisis 1997. Isu isu yang di bahas juga kembali seperti IGGI, ke ranah kebijakan politik, ekonomi sosial dan pertahanan/keamanan, pembuatan peraturan perundang undangan, dan lain sebagainya<sup>145</sup>.

Untuk mengelola pembayaran utang luar negeri, Bank Dunia selaku pimpinan forum CGI, telah menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk

---

<sup>143</sup> Drajad.H.Wibowo, *Ibid.*,hal 30

<sup>144</sup> Drajad H Wibowo dkk.,*Jebakan Utang dan Solusinya*, INFID,Jakarta, Cetakan I,April 2006 hal 10.

<sup>145</sup> INFID, Kertas Posisi, *INDONESIA :14 Tahun Dalam Cengkeraman CGI Tertindas Dan Dimiskinkan*, 2005, hal 1.

menempuh beberapa strategi yang dinilai mampu menjkamin keberlanjutan fiskal serta melindungi pengeluaran-pengeluaran bagi program sosial, di antaranya:<sup>146</sup>

1. Menunjukkan komitmen yang tegas untuk melaksanakan semua kewajiban internasional guna menjaga kepercayaan kreditor dan investor internasional.
2. Memanfaatkan kesempatan penjadwalan ulang pembayaran pokok dan bunga utang melalui Paris Club, yang akan ditentukan oleh kinerja Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program-program IMF serta kondisi neraca pembayaran.
3. Menurunkan defisit anggaran dari 10 persen PDB pada tahun 1998, menjadi 3,7 persen pada tahun 2001, dan 0 persen pada tahun 2004.
4. Mobilisasi pembiayaan domestik melalui privatisasi dan penjualan aset yang dikuasai BPPN.
5. Mendapatkan lebih banyak pinjaman konsesional dari CGI, khususnya dari IDA dan Bank Dunia, untuk menutup defisit anggaran yang masih ada

Seperti diungkapkan oleh Rizal Ramli, sewaktu memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan CGI ke 10 di Tokyo, IMF dan ADB meminta dibukannya pendirian supermarket internasional di seluruh pelosok kota di Indonesia, namun Rizal Ramli menolak dengan tegas. Begitupula dalam forum CGI meminta agar ABRI di Audit, ketika hal ini di konfirmasi merupakan kepentingan dari Panatgon. Setidaknya menurut Rizal Ramli ada 80 macam syarat yang diberikan dan diminta dalam pertemuan CGI tersebut ditolak dan dicoret oleh delegasi Indonesia.<sup>147</sup>

Kondisionlitas Bank Dunia dalam CGI misalnya, memberikan persyaratan sebagai bagian dari persetujuan pinjaman kepada Indonesia lewat CGI. Pinjaman diberikan asal Indonesia mau memenuhi syarat (*conditinalities*) yang diajukan konstituen CGI (terutama Bank Dunia), seperti menekan harga beras serendah mungkin dan meliberalisasi pasar beras dalam negeri. Menurut para negara donor, kebijakan harga beras murah perlu di tempuh karena sebagian besar petani kita berlahan sempit dan *net consumer*. Disimulasikan oleh mereka bahwa

---

<sup>146</sup> Sugeng Bahagijo, (Ed) *Keterkelolaan dan Legalitas Utang Luar Negeri Indonesia*, dalam kumpulan esai "Arbitrase Utang" *Penyelesaian Menyeluruh Masalah Utang Luar Negeri*, (INFID, Jakarta, 2002), hal 102-103

<sup>147</sup> Rizal Ramli, Wawancara, *Ibid*.

setiap kenaikan harga beras 10% jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1 juta orang.<sup>148</sup>

Rekomendasi anggota CGI yang disampaikan melalui CGI Brief yang diproduksi oleh World Bank, statement-statement yang disampaikan oleh negara-negara anggota sangat jelas, bahwa rekomendasi tersebut lebih merupakan “perintah” (SAP) daripada sekedar pertimbangan. Persyaratan itupun kemudian dilaporkan kemajuannya oleh pemerintah Indonesia, di wakili oleh setiap menteri yang berkaitan dalam setiap tahunnya. Persyaratan anggota CGI yang belum dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dikategorikan sebagai *Outstanding Issues*. Sementara perintah yang telah dilaksanakan tetap didiskusikan untuk dilihat beberapa kekurang sempurnaannya, dengan memberikan beberapa catatan. CGI, menjadi suatu komunitas berkekuatan “utang” untuk secara bersama-sama membuat tekanan ekonomi, politik yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat<sup>149</sup>.

Rekomendasi CGI dalam kebijakan ekonomi, sejalan dengan agenda globalisasi ekonomi yaitu konsolidasi fiskal, penekanan defisit anggaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan iklim investasi yang bersahabat bagi investor asing. *Policy* tersebut tergambar dalam *CGI Brief* 2003, 2004 dan 2005 yang mendukung pelaksanaan “*white paper* ala IMF”, reformasi sektor finansial dan program privatisasi. Agenda *CGI meeting* yang di selenggarakan secara tahunan pun membahas masalah tersebut, untuk mengontrol sejauh mana kepatuhan Indonesia terhadap rekomendasinya (SAP).

Pada pertemuan 1 November 2002 di Bali, CGI menekan pemerintah Indonesia untuk segera melakukan reformasi ekonomi yang dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Dalam pertemuan ini, negara-negara menjanjikan untuk mencairkan pinjaman sebesar US \$ 2,7 juta dalam tahun anggaran 2003, dengan kesepakatan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan beberapa hal sebagai berikut :<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> Khudori, *Neoliberalisme Memumpas Petani, Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*, Resist Book, Yogyakarta, 2004, hal 233

<sup>149</sup> INFID, *Kertas Posisi, INDONESIA: 14 Tahun Dalam Cengkeraman CGI Tertindas Dan Dimiskinkan*, hal 32-33.

<sup>150</sup> INFID *Statement to the CGI Meeting in Bali*, 21-22 Januari 2003, hal 1-2.

1. Memperbaiki iklim investasi untuk merangsang pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan,
2. Melakukan strategi pengurangan kemiskinan
3. Melakukan reformasi hukum yang merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan investor, misalnya dengan membentuk komisi anti korupsi
4. Melakukan desentralisasi fiskal.

Pada prinsipnya CGI cukup puas akan kemajuan pelaksanaan desentralisasi dan akan dilaksanakannya mekanisme *on-lending* yang merupakan bagian dari program desentralisasi fiskal. Untuk itu penting untuk merevisi lagi UU No. 22/1999 dan UU No. 34/2000 untuk mendukung desentralisasi fiskal. Proses revisi ini harus melalui proses konsultasi publik. Dengan adanya kekecewaan mengenai kurangnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi isu-isu dalam sektor kehutanan, maka dibentuk kolaborasi yang lebih luas antara stakeholder yang mungkin melibatkan pihak-pihak di luar Indonesia untuk mengatasi masalah kehutanan tersebut. Donor dan masyarakat sipil menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan didalam segala aspek kehutanan, termasuk kontrol yang diperketat terhadap polisi dan militer. Persoalan di dalam sektor kehutanan terkait erat antara penyelundupan kayu, korupsi dan penyalahgunaan hak azasi manusia. Konsisten dengan hal ini, pemerintah Indonesia meminta seluruh negara anggota CGI untuk tidak mengimpor kayu-kayu secara ilegal.<sup>151</sup>

Seperti yang terungkap dalam CGI Meeting tahun 2003 dalam era kepemimpinan Presiden Megawati, Forum pertemuan CGI menilai kemajuan reformasi struktural. Reformasi struktural di bawah pemerintahan Megawati umumnya masih berada di jalur yang tepat. Pemerintah memperbaharui upaya-upaya reformasi secara luas. Langkah-langkah utama yang diambil pada bulan belakangan ini mencangkup diterimanya Undang-Undang mengenai Komisi Anti-Korupsi, penjualan sebuah bank BPPN, dan pengumuman tentang lebih banyak penjualan. Sasaran pemulihan oleh BPPN telah terpenuhi, dan bahkan penerimaan dari privatisasi, meskipun sasaran semula untuk menjual saham dalam 25 perusahaan tidak terpenuhi sama sekali, ditengah perlawanan politik yang terus

---

151 INFID Ibid hal 1-2

meningkat terhadap privatisasi. Kesepakatan mengenai kredit likuiditas di masa lalu yang dicapai antara pemerintah dan bank sentral, restrukturisasi obligasi rekapitalisasi, dan mulai lelang obligasi modal semuanya memantapkan keberlanjutan fiskal, dan akan memberikan kontribusi kepada pengurangan premi risiko Indonesia. Yang kurang mengembirakan adalah perkembangan dalam kebijakan perdagangan, dimana serentetan langkah tarif dan non-tarif, mulai dari gula sampai kecengkeh dan tekstil, memberi sinyal adanya sikap yang lebih bersifat proteksionis<sup>152</sup>.

Karena itu pemerintah perlu: Terus meningkatkan pendapatan dengan percepatan reformasi yang telah dimulai dalam administrasi perpajakan dan bea cukai. Mengurangi pemborosan dan korupsi dengan memperbaiki pengelolaan pengadaan dan keuangan pemerintah. Mengembangkan pilihan-pilihan tabungan dengan mengevaluasi keefektifan program-program dan proyek-proyek yang ada. Melimpahkan lebih banyak tanggung jawab pengeluaran dengan merampungkan penyelenggaraan-penyelenggaraan untuk meberikan pinjaman-lanjutan kepada daerah, dan memperluas DAK. Meminimalkan pembiayaan hutang dari anggaran dengan melanjutkan penjualan asset-aset BPPN dan privatisasi. Memaksimalkan penggunaan dana-dana konsesional dengan meningkatkan pencairan dana berdasarkan komitmen yang ada sekarang<sup>153</sup>.

Mengenai reformasi struktural, pemerintah perlu menggunakan setahun di muka untuk mempercepat restrukturisasi perusahaan, dan mengupayakan reformasi yang masih tersisa di sektor keuangan, dengan:<sup>154</sup>

1. Meneruskan penjualan asset BPPN, dan menyelesaikan penjualan bank-bank yang telah dipilih.
2. Memperbaiki bank-bank negara, dan terus mengupayakan penjualannya yang telah diumumkan. Lebih jauh membangun jaring pengaman keuangan yang mantap melalui perbaikan dibidang pengawasan, penghapusan peran BPPN secara tertib, dan transisi bertahap kepada wewenang pengaturan yang baru di sektor keuangan.

---

<sup>152</sup> World Bank Brief for the CGI, "Indonesia Maintaining Stability, Deepening Reforms", 2003

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

3. Untuk mempercepat pertumbuhan dan investasi, pemerintah harus meningkatkan iklim investasi di negeri ini

Begitu juga dalam CGI *Brief* 2005, misalnya CGI menekankan disiplin fiskal. Memproyeksikan beban utang pemerintah sebesar 54% terhadap PDB di tahun 2004 akan turun menjadi 27 persen pada 2010. Dengan melanjutkan pengurangan subsidi BBM dan mengeluarkan untuk kepentingan social, dan mengasumsikan subsidi BBM tidak ada lagi di tahun 2008<sup>155</sup>. CGI telah mendesak pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten melaksanakan *White paper*. Dalam *Economic and Social Update* yang diterbitkan World Bank disebutkan outstanding issue yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia meliputi: revisi perpajakan dan undang-undang perpajakan, amandemen undang-undang No 22 tahun 1999 tentang desentralisasi dan undang-undang No 25/1999 tentang perimbangan keuangan, privatisasi Bank Permata, Penguatan governance dari Bank Indonesia, amandemen undang-undang kepailitan dan melakukan perubahan undang-undang No 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja dan perselisihan Hubungan Industrial<sup>156</sup>.

Munculnya berbagai macam peraturan serta undang-undang seperti undang-undang MIGAs, Listrik dan Air, adalah bagian perjanjian alias persyaratan yang harus dipenuhi antara Indonesia dengan para kreditor/donornya. Dalam sidang CGI 2005, kreditor mempertanyakan sejauh mana Indonesia memenuhi persyaratan yang diajukan? Misalnya saja, donor selalu mempertanyakan proses penyusunan UU Migas dan Listrik. Ketika negara-negara anggota CGI membicarakan “kepastian usaha,” maka yang dimaksudkan bukan hanya bagaimana Indonesia bisa memberantas korupsi dan berbagai pungutan, tetapi bagaimana Undang undang dan berbagai peraturan yang terbit berdasarkan perjanjian dengan kreditor tidak lagi diubah<sup>157</sup>.

Dalam diskusi dengan *Working Group Investment Climate* CGI, pada Juni dan September 2005 pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk membuat serangkaian kebijakan tentang : Peraturan Pemerintah Tentang Listrik, jalan toll, air, penyediaan tanah, Komite Koordinasi Percepatan Pembangunan

---

<sup>155</sup> World Bank, CGI Brief, *Economic and Social update*, Oktober 2005, hal 28

<sup>156</sup> World Bank : *CGI Brief for CGI mid year review meeting, Jakarta 2 Juni 2004*

<sup>157</sup> *Harian Media Indonesia*, 24 Januari 2005.

Infrastruktur dan revisi peraturan Pemerintah No 7/1998 tentang Partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur<sup>158</sup>.

Sehubungan dengan komitmen Pemerintah kepada *Working Group Investment Climate* CGI tersebut, Aburizal Bakrie dalam kapasitasnya sebagai menteri koordinator perekonomian melaporkan dalam *CGI Mid Year Review*, 3 Oktober 2005 bahwa Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 3 /2005 tentang ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah No 15/2005 tentang jalan tol dan Peraturan Presiden No 42/2005 tentang Komite Nasional Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Selain peraturan sedang dipersiapkan untuk direvisi seperti Peraturan Pemerintah tentang irigasi dan undang-undang tentang penerbangan airport<sup>159</sup>.

Selain itu CGI mendesak adanya perubahan dalam undang-undang Penanaman modal untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Unifikasi peraturan perundangan:<sup>160</sup>

1. Menggabungkan dua undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing. Draft undang-undang penanaman modal harus berorientasi pada prinsip-prinsip pasar:
2. Menghapuskan kewajiban divestasi dan menghapuskan semua bentuk kontrol terhadap investasi melalui persetujuan/ perijinan dan menggantinya dengan pendaftaran yang sederhana.
3. Menyediakan perlakuan sama bagi semua investor baik investor dalam negeri dan luar negeri. Harus melarang nasionalisasi perusahaan, kecuali untuk kepentingan Negara atau masyarakat luas, tindakan tersebut harus disertai dengan kompensasi sesuai nilai pasar.
4. Hak repatriasi modal yaitu mengatur tentang kebebasan untuk menjual aset kepada pihak lain yang dipilih. Dan mengatur hak untuk mentransfer modal, keuntungan, royalti, bunga, deviden dan semua bentuk biaya

Indonesia harus menelan pengarahannya CGI dalam penyusunan kebijakan ekonomi / keuangan yang belum tentu sejalan dengan *national interest*. Adanya

---

<sup>158</sup> World Bank, *CGI Brief, Economic and Social update*, Oktober 2005,

<sup>159</sup> Abu Rizal Bakrie, Keynote Address paper, Coordinating Minister for Economic Affairs at CGI Mid Year Review, Jakarta, 3 Oktober 2005

<sup>160</sup> World Bank, *CGI Brief, Economic and Social update*, Oktober 2005, hal 24.

CGI memang menguntungkan posisi tawar individual kreditor dalam mendiktekan kemauanya . Padahal kita tahu di dalamnya banyak negara dengan kredit kecil tetapi banyak mendikte. Sebaliknya bagi Indonesia sebagai debitor yang “diadili“ dalam sidang CGI itu menjadi total pesakitan yang harus tunduk pada kemauan kreditor yang acapkali diluar nalar, yakni hal – hal di luar ekonomi / keuangan. Karena itu tidak mengherankan bila setelah 40 tahun menjadi debitor dengan total komitmen utang luar negeri 1967-2006 sebesar US\$171,24M di-mana US\$10,8M tidak terserap dan saldo utang masih US\$ 61,31M, Indonesia tetap miskin. ibarat murid, Indonesia murid yang bodoh<sup>161</sup>.

Ketika mereka memberikan kredit kepada Indonesia setiap tahun selama 36 tahun. Indonesia dinilai habis habisan dan penggunaanya di awasi habis habisan . Dalam sidang CGI di Bali (2003), tidak kurang dari 11 menteri di panggil dan di suruh memberikan pertanggungjawaban dalam mengurus Indonesia, dan setelah itu di introgasi habis habisan<sup>162</sup>.

Agenda-agenda struktural dalam pertemuan CGI, mulai tahun 2000 hingga 2006, dapat dilihat dari table 2.3. Terlihat secara jelas, bagaimna CGI tidak saja membahas persoalan bantuan uar negeri, tapi sedemikian banyak rekomendasinya yang merambah persoalan diluar konteks bantuan.

**Tabel 2.3**  
**Agenda Bahasan Diluar Komitmen Bantuan/Utang**  
**Dalam Forum CGI Periode 2000-2006**

Pertemuan CGI	Agenda dan Isu yang di bahas
<b>Pertemuan IX , Februari 2000</b>	Agenda : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritas prioritas Pembangunan dan kondisi perekonomian</li> <li>- Good Governance</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Pengelolaan hutan</li> </ul>
<b>Pertemuan X, Oktober 2000</b>	Agenda : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritas-prioritas pembangunan</li> <li>- Manajemen keuangan negara dan utang (Pemerintah)</li> </ul>

<sup>161</sup> Fuad Bawazir, *Antara CGI Dan Mafia Berkeley* “Republik Keluh Kesah”, ,(Jakarta Rakyat Merdeka Books,2007), hal 270

<sup>162</sup> Kwiek Kian Gie, “Pengahiran Bantuan IMF “, *Kebijakan Ekonomi Politik dan hilangnya Nalar* . PT Kompas media Nusantara . Jakarta., 2006, Hal 81.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reformasi perbankan ,</li> <li>- <i>Desentralisasi</i></li> <li>- <i>Good government</i> , Reformasi hukum dan peradilan.</li> <li>- Kemiskinan</li> <li>- Kehutanan</li> <li>- Pengembangan usaha kecil dan menengah ,</li> <li>- Penangan pengungsi Timor – Timur dan insiden atambuan (Resolusi DK PBB No 1319)</li> </ul>
<b>Peretemuan XI , November 2001</b>	<p>Agenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan fiskal (<i>fiscal Sustainability</i>)</li> <li>- Reformasi hukum dan pengelolaan hutan</li> <li>- Kebijakan pengelolaan hutan</li> <li>- Desentralisasi</li> <li>- Pendidikan dasar</li> <li>- Pengurangan kemiskinan ,</li> <li>- Efektivitas penggunaan bantuan .</li> </ul>
<b><i>Mind- term review</i> , Juni 2002</b>	<p>Agenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberlanjutan fiskal ( <i>fiscal sustainability</i> )</li> <li>- Reformasi hokum dan peradilan, dan pemberantasan korupsi</li> <li>- Kebijakan pengelolaan hutan</li> <li>- Pengembangan usaha kecil dan menengah</li> <li>- Desentralisasi</li> <li>- Pendidikan dasar</li> <li>- Pengurangan kemiskinan</li> </ul>
<b><i>Informal interim Meting November 2002</i></b>	<p>Agenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak peristiwa bali dan upaya untuk mengatasinya ,</li> <li>- Keberlanjutan fiskal ( <i>Fiscal sustainaibility</i> )</li> <li>- Reformasi hukum dan peradilan , pemberantasan korupsi</li> <li>- Kebijakan pengelolaan hutan</li> <li>- Pengembangan usaha kecil dan menengah</li> <li>- Desentralisasi</li> <li>- Pendidikan dasar</li> <li>- Pengurangan kemiskinan</li> <li>- Efektifitas penggunaan bantuan</li> </ul>
<b>Pertemuan XII 21- 22 Januari 2003</b>	<p>Agenda :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan yang berpihak kepada penduduk miskin dan investasi</li> <li>- Upaya penanggulangan dampak peristiwa peledakan bom di bali dan masalah aceh setelah persetujuan penghentian permusuhan</li> <li>- Governance</li> <li>- Strategi pengurangan kemiskinan ,</li> </ul>

	Efektivitas Penggunaan bantuan .
<b>Mind- term review 2 juni 2003</b>	Agenda : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan iklim investasi : governance , reformasi hokum dan perundangan dan pengembangan prasarana</li> <li>- Peran kelompok kerja CGI</li> </ul> Isu- isu lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masalah Poltik dan Keamanan secara umum</li> </ul>
<b>Pertemuan ke XIII,10 - 11 Desember 2003</b>	Agenda : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Makro ekonomi, Investasi dan Reformasi Sektor Keuangan</li> <li>- Penanggulangan kemiskinan dan reformasi pemerintahan</li> <li>- Pembangunan infrastruktur dan Keamanan</li> <li>- Desentralisasi</li> <li>- efektifitas bantuan</li> <li>- Reformasi kehutanan,hukum dan kesehatan</li> </ul>
<b>Pertemuan XIV Jakarta, 19Januari,2005</b>	Agenda : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bencana Aceh dan Nias</li> <li>- Rencana pembangunan jangka pendek</li> <li>- Kemiskinan,Pendidikan dan Kesehatan</li> <li>- Desentralisasi</li> <li>- Keamanan dan Pembangunan</li> <li>- Reformasi Peradilan dan Anti Korupsi</li> <li>- Kehutanan dan Lingkungan</li> <li>- Efektifitas Bantuan</li> </ul>
<b>Pertemuan XV, Jakarta, 14 Juni 2006</b>	Agenda : Posisi makro ekonomi Investasi, Ekspor dan Pengangguran Pembangunan sektor keuangan Respon Bencana Alam (Yogyakarta) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana

*Sumber: Hasil Laporan-Laporan delegasi Indonesia dan dokumentasai pertemuan CGI, diolah penulis.*